

## Analisis Dampak Ketersediaan Sarana Publik terhadap Perekonomian Masyarakat Kabupaten Aceh Timur

Asyura, Iskandar, Asnidar

Universitas Samudra; Langsa, Aceh, Indonesia

### ARTICLE HISTORY

Received : 12 Januari 2025

Revised: 16 Februari 2025

Accepted : 11 Maret 2025

### KEYWORDS

Availability; Public Facilities; Economy;  
Community

### CORRESPONDENSI

Nama : Asyura

Email : [asyurabaru@gmail.com](mailto:asyurabaru@gmail.com)



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

### ABSTRACT

*This study aims to analyse the impact of the availability of public facilities on the community's economy in East Aceh Regency. The method used in this research is descriptive analysis with a sample of 96 respondents. Research data sources consist of primary and secondary data. The primary data is information obtained directly through interview interactions based on questionnaires with respondents, photographs and visual observations. While secondary data is data obtained from BPS. Data processing and analysis were carried out using SPSS 25 software. The results of the analysis show that public facilities have an average (mean) value of 29.3958 with a standard deviation of 3.82644. Meanwhile, the community economy variable has an average value of 21.8750 with a standard deviation of 2.30902. This finding indicates that public facilities have a significant influence on the economy of traders in the Idi Rayeuk office centre area. Thus, it can be concluded that the central office area in Idi Rayeuk, East Aceh Regency, is used by traders as a strategic location to run their businesses. The existence of public facilities contributes to the improvement of the community's economy, which is reflected in several indicators, such as increased income, increased employment opportunities, and the fulfilment of various community needs.*

## Pendahuluan

Perekonomian adalah salah satu aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat, meliputi produksi, distribusi serta konsumsi barang dan jasa. Usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara individu maupun kelompok serta cara-cara yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Menurut [Deliarnov, \(2009\)](#), ekonomi masyarakat adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi masyarakat. Dimana ekonomi masyarakat sendiri adalah sebagian kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan masyarakat kebanyakan dengan cara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan, yang selanjutnya disebut sebagai Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Berdasarkan perkembangannya, UKM di Indonesia dapat dibedakan menjadi 4 kriteria, yakni *Livelihood Activities*, *Micro Enterprise*, *Small Dynamic Enterprise*, dan *Fast Moving Enterprise* ([Haryanti, 2008](#)).

Indikator peningkatan perekonomian masyarakat diukur melalui beberapa aspek: Aspek pertama pendapatan, dimana pendapatan adalah sejumlah penghasilan yang diperoleh masyarakat atas prestasi kerjanya dalam periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan maupun tahunan. Pendapatan juga berupa total penerimaan, baik dalam bentuk uang maupun non-uang yang diterima seseorang atau suatu rumah tangga

dalam periode tertentu. Hal ini mengandung arti bahwa pendapatan merupakan sesuatu yang diperoleh karena pemanfaatan sesuatu yang lain, yaitu penggunaan kekayaan dan jasa-jasa tersirat juga adanya kemampuan dan keterampilan mengelola faktor-faktor tersebut untuk mendapatkan materi berupa kekayaan atau barang. Peningkatan pendapatan yang diperoleh masyarakat merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat melalui adanya peningkatan daya beli keluarga untuk membiayai kebutuhan sehari-hari, baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan khusus. Aspek kedua adalah lapangan pekerjaan, dimana tenaga kerja (*man power*) merupakan seluruh penduduk yang dianggap memiliki potensi untuk bekerja secara produktif. Hal ini berarti penduduk yang mampu menghasilkan barang dan jasa dapat disebut sebagai tenaga kerja, sehingga lapangan pekerjaan merupakan kesempatan maupun peluang kerja yang dapat dilakukan bagi orang yang sudah bekerja, sedang mencari maupun yang bersamaan sedang melakukan kegiatan rutin lainnya. Hal itu juga dikuatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar Hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengadaan kebutuhan infrastruktur berupa fasilitas sosial pada dasarnya merupakan hasil kekuatan penawaran pemerintah dan permintaan penduduk perkotaan ditambah dari kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan faktor yang mempengaruhi dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan kebutuhan penduduk dan penggunaan lahan eksisting untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Keberadaan fasilitas sosial dianggap optimal ketika terdapat minat atau keinginan masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas tersebut. Minat dan kesediaan penduduk dalam suatu wilayah dalam memanfaatkan fasilitas sosial dapat dilihat dari jumlah penduduk yang memanfaatkan fasilitas tersebut, karena pada dasarnya penduduk memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan fasilitas sosial. Kemudian faktor umum dari fasilitas sosial merupakan suatu bentuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari dengan penyediaan sarana dan prasarana kota. Berdasarkan beberapa pendapat ahli dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan fasilitas sosial antara lain adalah karakteristik penduduk, ketersediaan aksesibilitas dan kriteria kebijakan. Kebijakan publik memiliki peranan dalam perencanaan dan pembangunan fasilitas sosial (Ningtyas, 2019).

Sarana publik merujuk pada fasilitas atau pelayanan yang disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan umum dan dapat diakses oleh masyarakat baik langsung maupun tidak langsung secara bebas (Ompusunggu, 2019). Definisi fasilitas adalah segala sesuatu yang berbentuk benda maupun uang yang dapat memudahkan serta memperlancar pelaksanaan suatu usaha tertentu, sedangkan sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk menyelenggarakan dan mengembangkan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Fasilitas yang disediakan ini merupakan sarana yang memberikan kemudahan bagi masyarakat umum sehingga harus dipelihara dengan baik.

Ketersediaan sarana publik seperti pusat perkantoran, pasar, transportasi, fasilitas kesehatan, dan pendidikan sering kali menjadi faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Sarana publik yang memadai dapat meningkatkan

produktivitas masyarakat, meningkatkan akses terhadap sumber daya, meningkatkan pendapatan usaha, dan membuka lapangan kerja.

Pusat perkantoran publik menjadi salah satu komponen penting dalam struktur pemerintahan suatu negara. Kawasan pusat pemerintahan adalah wilayah dimana aktivitas politik, administratif, dan segala sesuatu yang terkait dengan urusan politik dan pemerintahan di suatu daerah berlangsung. Kawasan pusat pemerintahan tersebut selain berfungsi sebagai pusat dari struktur ruang kota (*the core, center*), dapat juga dipahami sebagai pusat kegiatan dari suatu kota (*the downtown*) (Purba, 2015). Kawasan pusat pemerintahan mencakup berbagai instansi pemerintah, seperti kantor gubernur, bupati, kantor kabupaten/kota, kantor resmi, dan lembaga lainnya yang terletak ditengah kota. Sebagai salah satu sarana publik kawasan pusat pemerintahan juga berfungsi sebagai sarana dalam pengelolaan sumber daya daerah dan penyediaan sumber penghidupan bagi penduduk yang ada dibagian wilayahnya (Alfari, 2015; Anggraini, 2021). Ruang terbuka publik juga mempunyai fungsi sebagai simpul dan sarana komunikatif serta sebagai pengikat sosial untuk menciptakan interaksi antara kelompok masyarakat dan sebagai tempat berkumpul sehari-hari dan pada kesempatan khusus (Pratiwi, 2016). Oleh karena itu, pusat pemerintahan termasuk dalam kategori sarana publik yang penting untuk memfasilitasi berbagai kegiatan administratif, pelayanan publik, dan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Namun beberapa kawasan pusat pemerintahan telah berkembang menjadi pusat kegiatan sosial, budaya, hiburan, dan mata pencaharian pedagang. Perubahan ini mencerminkan perkembangan perkotaan modern yang berfokus pada berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Pusat perkantoran Idi Rayeuk merupakan kawasan kantor terpadu Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang dalam pemanfaatan ruangnya memiliki keunikan dan perbedaan dari kantor pemerintahan pada umumnya yang identik dengan desain ruang dan bangunan yang kaku serta tertutup dimana tidak semua orang dapat mengakses dengan bebas. Konsep pembangunan kawasan Pusat Perkantoran Idi Rayeuk ditujukan sebagai ruang publik bagi masyarakat sehingga kawasan pusat perkantoran ini memiliki fasilitas ruang terbuka publik yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat baik masyarakat lokal maupun masyarakat di luar Kabupaten Aceh Timur. Masyarakat memanfaatkan ruang terbuka publik ini untuk berbagai keperluan, seperti untuk bersantai, bermain, berjalan-jalan, dan aktifitas jual beli. Oleh karena itu, ketersediaan terhadap ruang terbuka publik dapat mencerminkan tingkat kebahagiaan terhadap seluruh lingkungan perkotaan, dan akhirnya dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat (Huda, 2017).

Berdasarkan observasi awal, kawasan pusat perkantoran yang berada di Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh menyediakan ruang terbuka yang berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial, budaya, dan hiburan. Selain itu, kawasan ini juga menjadi lokasi mata pencaharian bagi pedagang yang sebelumnya menganggur dan kini memiliki pekerjaan. Letaknya yang strategis di pusat kota menjadikan pusat perkantoran Idi Rayeuk tidak hanya sebagai pusat administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai area yang dimanfaatkan masyarakat untuk berekreasi dan bersantai. Oleh karena itu, pembangunan kawasan ini diharapkan dapat memberikan

dampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya di Idi Rayeuk.

Analisis mengenai dampak ketersediaan sarana publik, khususnya pusat perkantoran pemerintah terhadap perekonomian masyarakat di Kabupaten Aceh Timur menjadi hal yang penting. Hasil analisis ini dapat menjadi dasar bagi pemerintahan dan merumuskan kebijakan terkait pengembangan sarana publik dan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama di kawasan pusat perkantoran Idi Rayeuk. Selain itu, analisis ini juga diperlukan sebagai landasan dan perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan di wilayah tersebut. Meskipun ketersediaan sarana publik memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat, namun terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan anggaran dan kesenjangan wilayah. Oleh karena itu, diperlukan Pendekatan holistik yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan sektor swasta, sangat penting untuk memastikan bahwa fasilitas publik dapat mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Penelitian menunjukkan bahwa pembangunan fasilitas umum seperti stasiun kereta api dapat meningkatkan pendapatan pedagang kaki lima di sekitarnya, dengan peningkatan pendapatan berkisar antara 20% hingga 50% (Aminar et al., 2023). Kedua, peningkatan dalam kualitas hidup, dimana Fasilitas pendidikan dan kesehatan yang berkualitas berkontribusi pada peningkatan keterampilan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya akses yang lebih baik terhadap pendidikan, masyarakat dapat meningkatkan kemampuan kerja mereka, yang berujung pada peningkatan pendapatan. Selain itu, fasilitas kesehatan yang baik mendukung produktivitas masyarakat dengan menjaga kesehatan mereka (Silvia & Syahbudi, 2023). Ketiga, mendorong ekonomi makro, dimana Ruang terbuka publik dan fasilitas umum lainnya memberikan peluang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk berkembang. Dengan adanya tempat yang memadai untuk berjualan atau beraktivitas sosial, masyarakat dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan perekonomian lokal.

Saputra et al., (2022) melakukan penelitian yang berjudul "Hubungan kualitas ruang publik terhadap terbentuknya keterikatan tempat di kawasan Perkantoran Terpadu Kota Batu". Metode yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kualitas ruang publik, analisis place attachment, analisis korelasi rank spearman, dan IPA (*Important Performance Analysis*). Hasil penelitian ini menunjukkan secara keseluruhan Taman Block Office memiliki kualitas ruang publik yang baik dikarenakan semua indikator berdasarkan PPS termasuk kedalam kategori kinerja yang baik. Keterikatan Masyarakat terhadap Taman Block Office sebanyak 53.57% pengunjung merasa cenderung terikat dan 8.93 % pengunjung merasa sangat terikat. Berdasarkan hasil analisis korelasi, terdapat hubungan antara kualitas taman dengan keterikatan masyarakat di Taman Block Office dengan tingkat hubungan yang sedang sebesar 0.429. Nilai korelasi yang bersifat positif menunjukkan apabila semakin baik kualitas Taman Block Office maka akan memberikan peningkatan yang cukup besar pada keterikatan masyarakat.

Rizky, (2023) melakukan penelitian yang berjudul "Dampak implementasi pembiayaan ijazah multijasa terhadap peningkatan perekonomian pedagang di BPRS Metro Madani KC. Kalijero". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

wawancara dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak dari adanya implementasi pembiayaan ijazah multijasa dalam rangka peningkatan perekonomian pedagang membawa dampak yang positif mendapatkan respon yang baik bagi nasabah pedagang, tetapi tidak membawa perubahan yang besar dalam segi pendapatannya dalam berdagang, hanya saja produk atau jasa yang disediakan dalam pembiayaan ijazah multijasa dapat membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan ekonomi ataupun biaya konsumtif contohnya seperti pendidikan, kesehatan, ibadah haji dan umrah. Peningkatan Perekonomian tidak hanya dilihat dari segi pendapatan yang meningkat tetapi juga dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan ekonomi lainnya. Topik yang sama juga diangkat oleh beberapa peneliti sebelumnya, yang dilakukan oleh [Yusmawar \(2016\)](#), [Badriyah \(2018\)](#), dan [Purwanto \(2014\)](#) yang mengkaji tentang dampak positif sarana publik terhadap masyarakat, kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian mereka bahwasanya ketersediaan sarana publik dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitarnya sehingga perekonomian masyarakat juga ikut meningkat.

Meskipun banyak penelitian telah dilakukan mengenai dampak ketersediaan sarana publik terhadap perekonomian, masih terdapat kekurangan dalam pemahaman tentang bagaimana berbagai jenis sarana publik, seperti infrastruktur transportasi (jalan raya dan jembatan), fasilitas pendidikan (sekolah dan pusat pelatihan), serta layanan kesehatan (puskesmas dan rumah sakit), secara simultan memengaruhi indikator spesifik perekonomian masyarakat, seperti pendapatan rumah tangga, tingkat pengangguran, dan perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Aceh Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis dampak ketersediaan sarana publik terhadap perekonomian masyarakat secara parsial maupun simultan. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan lebih mendalam serta menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan yang lebih terarah dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kabupaten Aceh Timur.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus konsentrasi publik dengan pendekatan kualitatif. Ruang lingkup penelitian ini hanya pada masyarakat yang melakukan aktivitas dikawasan Pusat Perkantoran Idi Rayeuk khususnya para pedagang. Sumber data pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer berupa informasi yang diperoleh langsung melalui interaksi wawancara dengan responden, foto dan pengamatan visual. Data ini diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber awal atau lokasi di mana objek penelitian berlangsung ([Mustofa, 2015](#)). Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari BPS. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pedagang yang ada di sekitar kawasan pusat perkantoran Idi Rayeuk. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut ([Sugiyono, 2017](#)). Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Penelitian ini menggunakan teknik *non-probability sampling* karena jumlah anggota populasi tidak diketahui, dan dengan purposive sampling sebagai teknik penentuan sampelnya.

Langkah pertama dalam proses penelitian ini adalah uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner (Sugiyono, 2016). Pengujian dikatakan valid jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$ . Kemudian dilakukan uji reliabilitas yang diperuntukkan untuk menunjukkan sejauh mana stabilitas dan konsistensi dari alat ukur yang digunakan. Kuesioner dikatakan reliabel apabila memberikan hasil yang konsisten jika digunakan secara berulang kali dengan asumsi kondisi pada saat pengukuran tidak berubah/objek yang sama dengan ketentuan *Cronbach Alfa* lebih besar dari 0,60 (Sugiyono, 2016). Kemudian dilakukan analisis deskriptif dengan alat bantu aplikasi komputer SPSS 25 yang akan menampilkan deskripsi statistik berupa nilai rata-rata (*mean*), simpangan baku (*standart deviation*) dan frekuensi jawaban untuk setiap variabel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak ketersediaan sarana publik terhadap perekonomian masyarakat Kabupaten Aceh Timur, sehingga dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam mengelola dan meningkatkan sarana publik sebagai salah satu instrumen utama untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Aceh Timur.

## Hasil dan Pembahasan

### Data Responden

Penelitian ini didapatkan karakteristik responden melalui hasil penyebaran kuesioner yang diidentifikasi mengikuti jenis kelamin, usia, pendidikan, dan jenis usaha responden.

**Tabel 1.** Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Laki-laki	61	63,54
Perempuan	35	36,60
Total	96	100,00

Sumber: Data diolah peneliti 2024

Berdasarkan tabel 1 dapat dijelaskan bahwa dari 96 responden, 61 orang (63,54%) adalah responden laki-laki, sedangkan 35 orang (36,60%) adalah responden perempuan. Perbedaan proporsi antara laki-laki dan perempuan dapat mencerminkan berbagai faktor, seperti tingkat keterlibatan gender dalam aktivitas di kawasan tersebut, akses terhadap pekerjaan serta pola peran dan ekonomi di masyarakat.

**Tabel 2.** Karakteristik Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah (orang)	Persentase (%)
15-20 tahun	11	11,45
21-30 tahun	25	26,04
31-40 tahun	29	30,20
> 40-58 tahun	31	32,31
Total	96	100,00

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan tabel 2 dapat dijelaskan bahwa dari 96 responden, 11 orang (11,45%) adalah responden dengan usia 15-20 tahun, 25 orang (26,04%) adalah responden dengan usia 21-30 tahun, 29 orang (30,20%) adalah responden dengan usia 31-40 tahun dan 31 orang (32,31%) adalah responden dengan usia > 40-58 tahun.

**Tabel 3.** Karakteristik Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
SD	17	17,70
SMP	22	22,91
SMA	39	40,62
Strata I	18	18,77
Total	96	100,00

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan tabel 3 dapat dijelaskan bahwa dari 96 responden, 17 orang (17,70%) adalah responden dengan dengan pendidikan SD, 22 orang (22,91%) adalah responden dengan pendidikan SMP, 39 orang (40,62%) adalah responden dengan pendidikan SMA, dan 18 orang (18,77%) adalah responden dengan pendidikan Strata I.

**Tabel 4.** Berdasarkan Jenis Usaha

Jenis Usaha	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Kuliner	62	64,58
Non Kuliner	34	35,42
Total	96	100,00

Sumber: Data diolah penelitian, 2024

Berdasarkan tabel 4 dapat dijelaskan bahwa dari 96 responden, 62 orang (64,58%) adalah responden dengan jenis usaha kuliner dan 34 orang (35,42%) adalah responden dengan jenis usaha non-kuliner.

### Hasil Uji Validitas

Berikut hasil perhitungan uji validitas dan reliabilitas yang dilakukan dalam penelitian:

**Tabel 5.** Hasil Uji Validitas

Sarana Publik			
Butir	Nilai Corrected Item Total Correlation / rhitung	rtabel	Keterangan
1	0,598	0,361	Valid
2	0,377	0,361	Valid
3	0,534	0,361	Valid
4	0,394	0,361	Valid
5	0,461	0,361	Valid
6	0,520	0,361	Valid
Perekonomian Masyarakat			

Butir	Nilai Corrected Item Total Correlation / rhitung	rtabel	Keterangan
1	0,616	0,361	Valid
2	0,775	0,361	Valid
3	0,382	0,361	Valid
4	0,435	0,361	Valid
5	0,431	0,361	Valid
6	0,685	0,361	Valid

Sumber: data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan Tabel 5, maka dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan untuk variabel sarana publik dan perekonomian masyarakat memiliki status valid, karena nilai rhitung > rtabel.

### Hasil Uji Reliabilitas

**Tabel 6.** Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha of Item Deleted	Keterangan
1	Sarana Publik	0,663	Reliabel
2	Perekonomian Masyarakat	0,743	Reliabel

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan Tabel 6, uji reliabilitas dilakukan terhadap item pernyataan yang dinyatakan valid. Oleh karena kedua variabel pertanyaan memiliki nilai *Cronbach's Alpha of Item Deleted* > 0,60 maka dapat dinyatakan instrumen reliabel.

### Hasil Uji Statistik Deskriptif

**Tabel 7.** Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sarana Publik	96	21.00	35.00	29.3958	3.82644
Perekonomian Masyarakat	96	16.00	25.00	21.8750	2.30902
Valid N (listwise)	96				

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan Tabel 7, dapat dijelaskan bahwa nilai mean sarana publik, yaitu 29,3958 dengan standar deviasi sebesar 3,82644, sedangkan pada variabel perekonomian masyarakat nilai mean yaitu 21,8750 dengan standar deviasi sebesar 2,30902. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa secara keseluruhan variabel sarana publik memiliki dampak terhadap perekonomian masyarakat khususnya pedagang di pusat perkantoran Idi Rayeuk yang ditunjukkan melalui indikator perekonomian seperti peningkatan pendapatan, terciptanya lapangan kerja, dan terpenuhinya kebutuhan dasar.

## Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata dengan keberadaan sarana publik di kawasan Pusat Perkantoran Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, memiliki dampak positif terhadap perekonomian masyarakat Idi Rayeuk, khususnya para pedagang. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata (mean) variabel sarana publik sebesar 29,3958 dengan standar deviasi 3,82644, serta nilai rata-rata variabel perekonomian sebesar 21,8750 dengan standar deviasi 2,30902. Dampak ketersediaan sarana publik terhadap perekonomian masyarakat khususnya Idi Rayeuk membawa dampak perubahan yang besar. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan pedagang, meningkatnya jenis lapangan kerja dan jumlah tenaga kerja yang terserap, serta tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kebutuhan lain yang bersifat sekunder maupun tersier, seperti pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap fasilitas sosial.

Ketersediaan sarana publik berdampak terhadap perekonomian masyarakat terutama pedagang, kondisi perekonomian dalam penelitian ini diukur berdasarkan 3 indikator peningkatan perekonomian, yakni: Pertama adalah pendapatan, dimana pendapatan merupakan hasil berupa uang atau hasil lainnya yang dicapai dari hasil penggunaan kekayaan jasa atas manusia. Pedagang merasa bahwa berjualan dikawasan pusat perkantoran pendapatannya meningkat dibandingkan saat berjualan dilokasi lain, hal tersebut ditandai dengan hasil penjualan yang mereka dapatkan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kedua adalah lapangan pekerjaan, dimana lapangan pekerjaan dapat diartikan sebagai tempat yang dicari oleh masyarakat luas. Adanya kawasan pusat perkantoran memberi kesempatan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan untuk berjualan dikawasan pusat perkantoran, dengan usaha yang terus berkembang mereka juga dapat berpengaruh terhadap lapangan kerja, banyak pedagang membutuhkan minimal satu karyawan untuk membantu penjualan mereka setiap hari, hal ini juga dapat mengurangi tingkat pengangguran di Aceh Timur khususnya Idi rayeuk. Indikator terakhir adalah terpenuhinya berbagai kebutuhan masyarakat yang lebih baik, dimana kebutuhan masyarakat umumnya mencakup beberapa hal seperti kebutuhan sandang, pangan, papan serta kebutuhan-kebutuhan lainnya untuk memenuhi kepuasan hidup dengan capaian suatu kemakmuran hidup. Dengan adanya lapangan pekerjaan masyarakat Idi Rayeuk dan sekitarnya merasakan dampak yang baik dalam meningkatkan taraf kesejahteraan bagi pedagang, dalam peningkatan pendapatannya sehingga mampu untuk memenuhi standar kehidupannya atau memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan kebutuhan sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal), yang merupakan kebutuhan pokok. Selain itu, terdapat pula kebutuhan lain yang bersifat sekunder maupun tersier, seperti pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap fasilitas sosial.

Dengan demikian, sarana publik tidak hanya memberikan manfaat ekonomi secara langsung, tetapi juga berperan sebagai katalisator dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih dinamis dan inklusif. kemudian sarana publik tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap

peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan penelitian mengenai dampak positif fasilitas umum terhadap pendapatan masyarakat.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, disimpulkan bahwa ternyata kawasan Pusat Perkantoran Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur berdampak secara positif terhadap peningkatan kehidupan masyarakat. Dengan adanya kawasan tersebut, masyarakat merasa aman dan nyaman berada dikawasan pusat perkantoran karena kebersihan kawasan tersebut juga selalu terjaga. Lokasi pusat perkantoran juga strategis, berada di dalam kota atau di sekitar pusat bisnis, sehingga mudah diakses oleh pedagang dan pengunjung. Masyarakat memanfaatkan tingginya arus lalu lintas karyawan dan pengunjung yang beraktifitas dikawasan Pusat Perkantoran Idi Rayeuk. Mereka menawarkan berbagai produk, mulai dari makanan dan minuman hingga barang kebutuhan sehari-hari. Namun tidak hanya menjual makanan dan minuman, tetapi mereka juga menawarkan dan menyewakan berbagai permainan anak-anak tepatnya diruang terbuka yang berada dikawasan Pusat Perkantoran Idi Rayeuk. Hal ini memberikan nilai tambah bagi pengunjung, terutama keluarga, yang dapat menikmati waktu berkualitas sambil bersantai dan berbelanja.

Hasil penelitian ini memberikan wawasan bagi pemerintah setempat dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan ruang perkotaan yang lebih baik. Pemerintah daerah dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai dasar dalam menyusun regulasi yang mendukung perkembangan usaha kecil dan menengah (UKM) di sekitar pusat perkantoran. Dengan memberikan akses yang lebih mudah bagi para pedagang kecil dan penyedia jasa, seperti sistem perizinan yang lebih sederhana atau penyediaan fasilitas usaha yang memadai, roda perekonomian masyarakat sekitar dapat semakin berkembang. Selain itu, kebijakan mengenai pengelolaan kebersihan dan keamanan kawasan juga menjadi hal penting agar lingkungan tetap nyaman dan menarik bagi pengunjung.

Berdasarkan analisis hasil penelitian, terdapat beberapa saran peneliti, yaitu untuk meningkatkan kenyamanan dan kebersihan di lokasi pedagang pemerintah perlu menambah jumlah tempat sampah dan fasilitas lain di sekitar area pedagang, kemudian para pedagang di kawasan pusat perkantoran Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur agar tetap dapat menjaga kebersihan dan tidak melanggar aturan-aturan yang berlaku, Serta untuk peneliti selanjutnya agar dapat memperluas penelitian ini seperti mengkaji dari aspek sosial masyarakat.

### **Daftar Pustaka**

- Alfari, Shabrina,. (2015). 'Kawasan Pusat Pemerintahan', ARSITAG, <<https://www.arsitag.com/article/kawasan-pusat-pemerintahan>> [accessed 10 August 2023]
- Aminar, Juni A., Rahmania, A., Moefti Aurelie, Z., Kayowuan Lewoleba, K., Basri, H., Hidayatullah, A. (2023). Pengaruh Pembangunan Fasilitas Umum Terhadap

- Penghasilan Masyarakat Di Sekitar Bulungan Blok M. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, 3, 7861–7870. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative%0APengaruh>
- Anggraini, W., Istiqomah, I., Widayaningsih, N., & Purnomo, S. D. (2021). Pengaruh Infrastruktur Fisik Terhadap Output Sektor Industri Pengolahan Di Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 10(1).
- Badriyah, L. (2018). Kajian dampak sosial ekonomi dan strategi meningkatkan pendapatan masyarakat dari adanya taman kota di kota semarang. Universitas Negeri Semarang, 23.
- Deliarinov. 1995. Pengantar Ekonomi Makro. Jakarta: UI-Press
- Haryanti, D. T. (2008). Kajian Pola Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik Kawasan Bundaran Simpang Lima Semarang. [Study of Public Open Space Utilization Patterns in the Simpang Lima Semarang Roundabout]. 168. <https://core.ac.uk/download/pdf/11716848.pdf>.
- Huda, K. (2017). Pengaruh Kualitas Fisik Ruang Terbuka Publik Aktif Perkotaan terhadap Kualitas Hidup Masyarakat. October 2017, A023–A030. <https://doi.org/10.32315/ti.6.a023>
- Mustofa. (2015). Metode Penelitian dengan NPF dan Roa. *Jurnal*, 1–9.
- Ningtyas, S, A. (2019). Analisis kebutuhan dan jangkauan pelayanan sarana pendidikan SMP/MTs di Kecamatan Dukuhwaru. *Kajian Literatur Ketimpangan Pembangunan*, 1–18.
- Ompusunggu, V. M. (2019). Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Desa Semangat Gunung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://jurnal.stkipggritulungagung.ac.id/index.php/jupeko/article/download/870/397>
- Pratiwi, Y. (2016). Transformasi Fungsi Ruang Terbuka Publik Di Perkotaan Studi Kasus: Taman Pedestrian Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. *NALARs*, 15(1), 63. <https://doi.org/10.24853/nalars.15.1.63-72>
- Purba, H. (2015). Prinsip Perancangan Kawasan Pusat Pemerintahan. <https://www.slideshare.net/hermanspurba1/b-a-b-1-pondahuluan-prinsip-perancangan-kawasan-pusat-pemerintahan>
- Purwanto, E. (2014). Privatisasi Ruang Publik dari Civic Centre menjadi Central Business District (Belajar dari kasus Kawasan Simpang Lima Semarang). *Jurnal Tataloka*, 16(3), 153. <https://doi.org/10.14710/tataloka.16.3.153-167>
- Rizky, N. A. (2023). DAMPAK IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA TERHADAP PENINGKATAN PEREKONOMIAN PEDAGANG DI BPRS METRO MADANI KC. KALIREJO [IAIN METRO]. In IAIN METRO. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/8637>

- Saputra, P. A. H. E., Sasongko, W., & Parlindungan, J. (2022). Hubungan Kualitas Ruang Publik Terhadap Terbentuknya Keterikatan tempat Di Kawasan Kota Batu. *Planning for Urban Region and Environment*, 11(0341), 19–30.
- Silvia, F., & Syahbudi, M. (2023). Tantangan Dan Peluang: Peran Ekonomi Dalam Peningkatan Pelayanan Publik. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 01(12), 90–100.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Yusmawar (2016). Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, E., & Aceh, B. (2016). Manfaat Ruang Terbuka Hijau Bagi Masyarakat Perkotaan ditinjau dari Aspek Sosial Ekonomi Kota Banda Aceh. *JIM) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah*, 1(1), 290– 298